

Determinasi Keputusan Pembelian Konsumen: Studi pada Harga, Pelayanan, dan Promosi

Author; Siti Alfi¹, Aulia Putri²

Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia

Jl. Sumpah Pemuda No. 18, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta,
Provinsi Jawa Tengah 57136

Korespondensi penulis: auiasiti99@gmail.com

Abstract. *Gojek is a technology-based transportation service company headquartered in Jakarta, Indonesia. It was established by Nadiem Makarim, an Indonesian entrepreneur who holds a Master of Business Administration degree from Harvard Business School. This study focuses on consumers who utilize Gojek services in the Surakarta area. The primary objective is to examine the effect of price, service quality, and promotion on consumers' purchasing decisions. This research applies a survey method with a quantitative approach. The data used are primary data collected directly from respondents. The population consists of all Gojek users in Surakarta, with a sample size of 110 respondents selected through purposive sampling. Data collection was carried out using questionnaires. The analytical techniques employed include descriptive analysis, multiple linear regression, t-test, F-test, and coefficient of determination (R^2). The findings indicate that price does not significantly influence purchasing decisions among Gojek users in Surakarta. In contrast, service quality and promotional activities have a significant impact on consumers' purchasing decisions.*

Keywords: *Price, Service, Promotion, and Purchasing Decisions.*

Abstrak Gojek merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan transportasi berbasis teknologi dengan kantor pusat yang berlokasi di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makarim, seorang warga negara Indonesia yang meraih gelar Master of Business Administration dari Harvard Business School. Penelitian ini difokuskan pada konsumen yang menggunakan layanan Gojek di wilayah Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh harga, kualitas layanan, dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen pengguna Gojek di Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden. Populasi penelitian mencakup seluruh pengguna layanan Gojek di Surakarta, dengan jumlah sampel sebanyak 110 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif, uji regresi linear berganda, uji t, uji F, serta uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Gojek di Surakarta. Sebaliknya, variabel kualitas layanan dan promosi terbukti berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen.

Kata Kunci: Harga, Pelayanan; Promosi; dan Keputusan Pembelian

1. LATAR BELAKANG

Pada pertengahan perkembangan ekonomi era reformasi tahun 1998, muncul tuntutan pembentukan otonomi daerah yang lebih komprehensif, sejati, dan akuntabel. Menanggapi tuntutan tersebut, disahkanlah Undang-Undang otoritas local UU No. 32/2004 dan hukum perdagangan yang tidak seimbang antara Bank Sentral dan Negara sehingga memperkuat

pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal inilah yang memunculkan apa yang disebut dengan proses transisi otonomi daerah, yaitu peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi (Yanto dan Astuti, 2020).

Dekonsentrasi pemerintahan telah berakhir, dan desentralisasi atau juga disebut sebagai otonomi daerah telah menggantikan peran tersebut. Setiap daerah diberi otonomi yang cukup besar untuk menjalankan rumah tangga mereka sendiri dengan intervensi minimal dari pemerintah federal, seperti yang dijelaskan dalam UU No. 32/2004 yaitu memberikan otonomi yang signifikan bagi otoritas. Dikatakan kepada distrik demi meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan promosi partisipasi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi dimaksudkan guna mengembangkan kemakmuran juga fasilitasi publik, meningkatkan kedaulatan rakyat, menegakkan keseimbangan serta kesetaraan, dan mempertahankan korelasi baik antar daerah (Bilqis dan Priyono, 2023).

Otonomi daerah yaitu ketika sebuah daerah memiliki kebebasan untuk menetapkan peraturan, berkumpul, berorganisasi, dan melaksanakan kebijakan, serta mengatur keuangannya sendiri (Sari dan Mustanda, 2019). Pemerintah pusat tidak dapat mengawasi kemajuan daerah secara mandiri, itulah sebabnya kebijakan otonomi daerah diterapkan. Pemerintah daerah memiliki autonomi, yang berarti mereka dapat secara mandiri membuat peraturan, membuat dan menerapkan kebijakan, dan memantau keuangan mereka sendiri. Ini biasanya berarti bahwa pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk memahami dan memenuhi kebutuhannya. Kawasan diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensinya dengan menerapkan kebijakan otonomi daerah (Antari & Sedana, 2018).

Pendapatan Asli Daerah adalah suatu jenis dana wilayah yang diteliti. PAD dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai alat untuk mengurangi pinjaman perusahaan serta mendorong pertumbuhan wilayah. Keterkaitan mengenai modal publik. Seberapa besar atau kecil pemerintahan suatu daerah akan menentukan seberapa baik ia dapat mengatur dirinya sendiri dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Pelaksanaan berbagai tugas operasional masyarakat akan lebih mudah dengan pemerintah daerah yang berskala besar. Semakin banyak pemerintah daerah, semakin sedikit kapasitas daerah yang mendapatkan hasil pendapatan. Namun, kegiatan dana daerah masih dapat dioptimalkan (Mahadewi dan Indraswarawai, 2023).

Menurut Rafika Aulia dan Rahmawaty (2020) kemajuan yang dicapai oleh suatu daerah adalah hasil berdasarkan potensi daerah untuk mengendalikan finansial dengan sukses. Rencana pendapatan dan pengeluaran daerah menunjukkan seberapa mampu pemerintah daerah mengelola dana keuangannya. Ini mencakup kapasitas mereka untuk mendanai pembangunan, meningkatkan pendapatan daerah, dan menyediakan layanan sosial kepada

warganya. Selama dua tahun terakhir, realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Aceh telah menurun. Ini turun dari 18,71 triliun rupiah pada 2019. Ini terkait dengan bagaimana pandemi COVID-19 telah mempengaruhi penghematan biaya. Belanja modal melibatkan biaya langsung dan tidak langsung, yang merupakan masalahnya. Realisasi total 9,23 triliun terdiri dari 605.956 miliar belanja karyawan, 4,51 triliun membeli benda dan layanan, dan 3,16 triliun investasi. Di Indonesia, pandemi COVID-19 telah menyebabkan mode belanja menurunkan plafon (Pemerintah Provinsi Aceh, 2020). Selain itu, ada hubungannya dengan masalah dana perimbangan provinsi Aceh, yang totalnya sebesar Rp4,23 triliun pada 2019 tetapi hanya digunakan Rp4,28 triliun. Surplus disebabkan oleh perubahan dana alokasi umum yang berkaitan dengan pembiayaan pendapatan tahun anggaran 2019 pemerintah Aceh. Di Aceh, PAD sebesar Rp 2,5 triliun digunakan secara bersamaan untuk proyek pembangunan tahunan senilai 4,6 hingga 9,1 triliun. Anggaran yang diberikan tidak cukup untuk mempercepat kemajuan Aceh. Ini karena Aceh terus membutuhkan dana besar untuk program seperti beasiswa, kelanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), program utama Aceh serta perluasan jaringan jalan rencana prioritas Kabupaten (Safrina, 2021)

2. KAJIAN TEORITIS

a. Definisi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Lathifa dan Haryanto (2019) ada sumber daya keuangan daerah terdiri dari dua kategori. Pertama, undang-undang menetapkan PAD, pembiayaan bagi hasil, dan pendapatan asli daerah lainnya sebagai bahan finansial otonom. Kedua, pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk melakukan inisiatif tertentu yang akan menghasilkan hasil setelah beberapa tahun. Pengembangan area fasilitas umum yang dapat menghasilkan infrastruktur adalah salah satu rencana. Karena belanja modal termasuk dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, maka kalimat tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran modal berlangsung yang memungkinkan daerah menghasilkan pendapatan.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengklasifikasikan aset tetap dan belanja modal baru. Pengeluaran di masa depan diperkirakan akan menguntungkan mengambil pengeluaran pemeliharaan selama berbagai periode akuntansi dan peranannya dalam memperpanjang masa pakai, kapabilitas standar aset. Pengeluaran otonom, menurut regulasi Mendagri UU No. 13 Tahun 2006 mengenai penatausahaan keuangan daerah, didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk membeli, membangun, atau membeli aktiva tetap berwujud yang memiliki masa umur melebihi setahun juga dapat dilaksanakan saat pelaksanaan pemerintahan. Lahan, mesin, alat, konstruksi, struktur jalan, irrigation, jaringan, serta aset lainnya dapat termasuk

pada kategori aktiva tersebut. Pengembangan, pengadaan, atau akuisisi hanya boleh memasukkan biaya pembangunan atau pembelian aset tetap fisik. Hasilnya adalah memiliki aset tetap yang dimiliki, yang merupakan kondisi yang diperlukan, dan belanja modal diperlukan. Tugas utama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik. Pihak berwenang anggaran Belanja Modal APBD adalah alat keuangan yang digunakan oleh daerah untuk meningkatkan aset tetapnya. Anggaran ini didasarkan pada kebutuhan infrastruktur dan fasilitas daerah, yang membantu menjalankan tugas pemerintahan dan fasilitas umum dengan lebih efisien. Pemerintah daerah sering membeli aset tetap setiap tahun untuk tujuan anggaran dan layanan publik, yang berdampak keuangan jangka panjang (Prastiwi dan Aji, 2020). Akan tetapi belanja modal yang dianggarkan setiap tahun menunjukkan investasi pemerintah daerah pada APBD. Jika peningkatan pendapatan APBD suatu provinsi di kota dan kabupatennya tidak diimbangi dengan peningkatan uang investasi, infrastruktur, dan fasilitas fisik yang tidak memadai akan mempengaruhi kota dan kabupaten yang sedang berkembang, menurunkan potensi ekonomi (Arini dan Kusuma, 2019).

Pendapatan Asli Daerah adalah pembiayaan untuk wilayah, komponen utama demi mencapai upaya kemandirian daerah itu dipakai sebagai pemasok dana perkembangan wilayah serta operasional pemerintah berdasarkan potensi daerah. Sumber pendapatan yang stabil bagi negara untuk memenuhi kewajiban pembangunan dan pemerintahan. Daerah yang menggunakan APBD dengan efisien mendapat manfaat dari PAD yang efisien. (Pangestu, 2023). Besarnya pendapatan yang diterima daerah yang bersangkutan sebagai Asli Daerah (PAD) menunjukkan seberapa baik daerah tersebut mampu mengelola keuangannya. Satu komponen dari pendekatan untuk mengevaluasi seberapa bergantung pada lingkungan terhadap pemerintah federal ialah melihat nilai PAD. Ketergantungan daerah terhadap pendanaan pemerintah pusat menurun seiring dengan meningkatnya nilai kontribusi PAD terhadap APBD (Bella, Sari dan Aswin 2022).

Penyediaan berdasarkan "Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah" Mendagri Nomor 13/2006, dipengaruhi oleh pajak, retribusi, dan administrasi kekayaan wilayah. Hasil ini termasuk porsi keuntungan dari hasil modal pada BUMD, BUMN, dan juga usaha swasta atau UMKM.

Selain itu, ada bentuk-bentuk PAD tambahan yang dihasilkan asal sumber lainnya dapat diterima yang dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan wilayah bukan termasuk dalam retribusi daerah, keuntungan dari pengelolaan aset daerah dibagi menurut objek penghasilan, dan pajak daerah (Lastri, Fatma dan Hardiansyah, 2021). PAD Kekayaan khas, pendapatan asli, Bea dan pungutan wilayah adalah penerimaan asli daerah lainnya yang dapat diterima. Ini

merupakan sumber penghasilan daerah bahwa sangat penting untuk mencukupi pengeluaran, terutama pada belanja modal (Prawiroyudo dan Suhendro, 2023).

b. Belanja Modal

Capital expenditure adalah beban anggaran dibayar dengan membeli aset tetap dan aset lainnya mampu menghasilkan keuntungan sepanjang periode pelaporan. Pengeluaran anggaran dialokasikan berdasarkan keperluan otonomi akan fasilitas yang diperlukan bagi operasi pemerintahan dan proyek pekerjaan umum (Handayani dan Erinos, 2020). Belanja modal dapat membantu masyarakat dengan membangun infrastruktur, membeli mesin, dan memperoleh lebih banyak aset tetap. Salah satunya adalah biaya modal yang dimasukkan ke dalam anggaran belanja langsung pemerintah dan menyebabkan pemerintah memiliki lebih banyak aktiva tetap. Keputusan belanja modal dibuat oleh otonomi wilayah berdasarkan infrastruktur dan instrumen yang diperlukan guna mengoperasikan fasilitas umum dan menyelesaikan tugas resmi dengan cepat (Aulia Devi dan Tjahjono, 2023).

Menurut PP 71/2010, "Belanja modal yaitu pengeluaran otonomi daerah dengan keuntungannya lebih dari satu periode anggaran dan menjadi penambah aset daerah, kemudian dapat menyebabkan biaya teratur misalnya dana perawatan meningkat pada jenis-jenis belanja tata kelola" (Niswani dan Firdaus, 2022). Pengeluaran dana dipakai guna membeli aktiva tetap regional, Gedung dan peralatan. Metode untuk memperoleh belanja modal adalah dengan membeli aktiva tetap yang masih dalam kepemilikan pemerintah kota sebagai hasil dari belanja modal. Ini adalah komponen terutama dalam menyediakan layanan publik. Setiap periode, pemerintah kabupaten menyisihkan dana rencana belanja daerah guna membeli aktiva tetap yang sesuai tujuan, pengeluaran, dan layanan publik yang memiliki dampak keuangan jangka panjang untuk meningkatkan jumlah aset yang tersisa (Hardi, 2019).

Capital expenditure merupakan biaya aset, seperti membeli produk akan bertahan lama juga dapat terpakai dalam jangka waktu lama. Pada hal otoritas, misalnya, mendirikan sekolah baru, membeli software, membangun jalan raya, dan hospital, dan sebagainya. Belanja modal, yang dapat bertahan selama beberapa dekade, dapat menghasilkan pengelolaan ekonomi yang lebih hemat. Belanja modal terdiri oleh inisiatif kecil dan rencana satu tahun. Meskipun demikian, proyek yang lebih kompleks membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan (Marlina, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang No. 71/2010 tentang standard accounting, mengatakan belanja modal adalah total uang yang dibelanjakan untuk operasi tetap dan operasi menguntungkan lainnya selama beberapa waktu akuntansi. Kekayaan negara yang dapat digunakan, meliputi aset tambahan, bernilai setara dengan aset lainnya dan berumur lebih lama

dari setahun. Yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, belanja dikenal sebagai belanja daerah. Kegiatan anggaran melibatkan pemerintah federal dan daerah. Belanja pemerintah daerah digambarkan sebagai penurunan nilai aktiva bersih pada tahun anggaran yang berlaku. Melalui pembiayaan daerah, pemerintah federal menunjukkan komitmennya terhadap distrik wilayah melalui penyediaan wewenang untuk memantau serta mengawasi operasi otoritas wilayah serta kepentingan komunitas sekitar investasi yang dilakukan pemerintah daerah sangat baik karena adalah tanggung jawab regional selama satu tahun yang bukan kewajiban menerima kompensasi dari daerah. Tujuan belanja daerah adalah untuk memperbaiki daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Saat laba wilayah yang dapat diperoleh bertambah, kemampuan mereka demi membiayai pembelian daerah bisa meningkat (Aulia Devi dan Tjahjono, 2023).

c. Kinerja Keuangan

Menurut Berti Indah Sari dan Halmawati (2023) kinerja didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan dalam melaksanakan program kebijakan untuk memenuhi tujuan, tujuan, dan visi pemerintah otoritas. Efisiensi fiskal daerah ialah yemuan studi kuantitatif tentang kontribusi program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Evaluasi kinerja fiskal oleh pemerintah daerah beroperasi sebagai sumber informasi mengevaluasi juga memutuskan strategi untuk meningkatkan standar sektor publik.

Suatu organisasi dapat menilai kinerjanya dengan menganalisis rasio keuangan. Namun, pemerintahan kota belum sering menggunakan analisis rasio. Bahwa saat ini tidak ada kejelasan arah karena hanya sedikit pihak yang mengevaluasi kesuksesan keuangan daerah dengan menggunakan financial analysis ratio pada sektor publik (pemerintah), khususnya APBD. Untuk menjaga keterbukaan, integritas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah, analisis rasio masih diperlukan (Darmastuti, 2022).

Ada keyakinan bahwa peraturan keuangan daerah yang efektif akan menghasilkan pengelolaan pendapatan daerah yang lebih baik juga. Kinerja fiskal daerah yang kuat menunjukkan bahwa daerah itu kuat secara keseluruhan. Kinerja finansial suatu daerah adalah tolak ukur daya pemerintah dalam mengelola otonomi daerah. Ada banyak cara untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Untuk menghitung kinerja keuangan dapat menggunakan sumber informasi finansial seperti bugjet pemasukan serta pengeluaran wilayah. Meningkatkan prestasi otoritas daerah, meningkatkan kelembagaan dan komunikasi, meningkatkan akuntabilitas publik dapat membantu pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya adalah tiga tujuan dari pengukuran kondisi keuangan daerah pemerintah (Yulinchton, 2022).

Pemerintah kota telah melakukan tindakan yang diakui secara finansial untuk mengevaluasi seberapa efektif mereka menghasilkan pendapatan dan menggunakan sumber daya mereka untuk mencari peluang untuk berkembang dan berkembang. Laporan keuangan pemerintah dapat digunakan untuk menunjukkan keadaan dan kinerja pemerintah. Laporan keuangan yang kuat harus menunjukkan bahwa rangkuman pelaporan memperoleh informasi yang akurat dan bermakna mengenai kinerja keuangan pemerintah dalam penyajian keuangannya (Febrianti dan Putra, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penulis memakai pendekatan SLR (Systematic Literature Review), yang berarti mengkritik serta menilai riset sebelumnya secara sistematis dengan menerapkan standar yang berlaku. Metode ini digunakan untuk memeriksa hasil penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal yang berfokus pada bidang studi tertentu. Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan tanpa perlu melakukan pengumpulan secara langsung di tempat kejadian. Dengan menggunakan Google untuk melakukan pencarian data dengan Kata kunci menjadi fokus utama seperti "pemasukan daerah, investasi infrastruktur, evaluasi keuangan.", diperoleh 1.000 artikel yang relevan. Selain itu, menulis 573 artikel tentang berbagai tema terkait. Kami membatasi tahun penerbitan jurnal menjadi 2018–2024 karena jumlah ini tidak mencukupi, dan kami menemukan 139 artikel. Pada akhirnya, kami mengumpulkan 53 publikasi dari berbagai jurnal global, termasuk Google Scholar, Publish of Perish, dan Semantic Scholar, setelah mengekstrak beberapa artikel sampel yang sesuai dengan fokus penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jurnal-jurnal terdahulu yang dipilih dan dibaca dengan cermat oleh penulis dan dikategorikan sesuai dengan relevansi istilah utamanya, "revenue local", "pengeluaran untuk asset tetap", serta "efisiensi keuangan". Tabel matriks dibuat sebagai hasil dari proses penelitian ini oleh penulis untuk memudahkan dalam mengkategorikan sesuai kata kunci, seperti tabel dibawah ini:

Table 1
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun	Metode	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan	Ni Luh Putu Dita Silviani, I Made	2023	Kuantitatif	Kenaikan PAD mampu mengoptimalkan penanaman modal

	terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Budget Ratcheting sebagai Variabel Moderasi	Pradana Adiputra			daerah. Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal semakin kuat dengan adanya budget ratcheting.
2	Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah di Kota Makassar terhadap Pendapatan Asli Daerah	Imran Tajuddin	2024	Kuantitatif	Pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah berdampak positif terhadap PAD dan menjadi dasar peningkatan penerimaan daerah di Kota Makassar periode 2012–2021.
3	Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Amin Insani, Sri Rahayu, Misni Erwati	2023	Kuantitatif	Peningkatan PAD dapat meningkatkan kinerja keuangan, namun ketergantungan pada dana pusat menyebabkan kinerja keuangan menjadi rendah.
4	Efek PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah dan SILPA terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi	Fauzi Fauzi	2021	Kuantitatif	PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau (2010–2017).
5	Pengaruh PAD, DAU, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat	Nareswari, Listya Nindita, Sri Rahayu	2018	Kuantitatif	PAD, DAU, dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Terdapat korelasi negatif antara tingkat kemandirian dan ketergantungan daerah.
6	Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Kinerja	Yuliasti Leki, Amran T. Naukoko,	2018	Kuantitatif	PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, namun tidak

	Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	Jacline I. Sumual			signifikan secara statistik.
7	Pengaruh Belanja Modal terhadap Peningkatan PAD Provinsi Papua	Agus Sunaryo	2023	Kuantitatif	Belanja modal berkontribusi positif terhadap PAD, namun tidak signifikan secara statistik di Provinsi Papua.
8	Pengaruh Good Corporate Governance, PAD, DAU, Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gresik	Allen Pranata Putra, Adam Rio Fandi	2021	Kuantitatif	GCG, PAD, dan DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal dan kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh signifikan.
9	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Nurhasanah, Annisa Sarina Devi, Nelly Masnila	2022	Kuantitatif	Kinerja keuangan daerah (pertumbuhan, efisiensi, efektivitas, dan ketergantungan) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Menurut Mubarak Husni (2022) efektivitas Realisasi PAD menurun, sementara realisasi pengeluaran daerah meningkat. Kontribusinya sekadar mengalami sedikit perubahan antara kurun waktu 2024 dan 2025. Mengingat kedudukan efikasi PAD terhadap belanja daerah di Kabupaten Bengkalis berbeda-beda. Kinerja PAD tidak berkorelasi langsung dengan kinerja belanja daerah seperti yang tergambar pada tahun 2024–2025.

Secara alami, ada banyak variabel yang mempengaruhi kemandirian daerah. Variabel keuangan, kesejahteraan, dan lingkungan adalah beberapa yang paling signifikan, dan hubungan antara variabel ini berdampak pada kemandirian daerah, dengan manfaat positif terhadap hasil keuangan daerah.

Tabel 2
Topik Penelitian

Topik Penelitian	Jumlah	Presentase
Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	19	38%
Pendapatan Asli Daerah Terhadap Daerah Kinerja Keuangan, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi	14	28%
Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal	13	26%
Pendapatan Daerah Terhadap Kemandirian	4	8%
Total	50	100%

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini mengusut implikasi pembelian modal dan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan level keterlibatan personel pemerintah Indonesia. Studi ini menemukan bahwa manfaat daerah yang belum berkembang berpengaruh positif dan signifikan terhadap operasi otoritas wilayah. Itu menyatakan yakni jika daerah mendapatkan lebih banyak devisa, mereka dapat menjadi lebih kuat. untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemekaran wilayah. Terlebih lagi, capital expenditure menguntungkan hasil mata uang pemerintah daerah. Akibatnya, struktur pembangunan daerah dapat diperkuat dengan peningkatan modal share. Ini juga berpotensi mengembangkan tingkat pergerakan ekonomi dilokasi yang dimaksud..

DAFTAR REFERENSI

- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Aulia Devi, A., & Tjahjono, A. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah (Pad), dana alokasi umum (Dau), dana alokasi khusus (Dak), dan dana bagi hasil (Dbh) terhadap belanja modal pada provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(3), 1104–1126. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v3i3.778>
- Aulia, R. R. (2020). Pengaruh kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh. *Volume(5)(4)*, 584–598.

- Bella, S., Sari, F., & Aswin, U. R. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Volume(3)(5)*.
- Bilqis, H. K., & Priyono, N. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah periode 2015-2020. *Jurnal Economina*, 2(2), 612–621. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.340>
- Darmastuti, W. Y., Susilowati, E., & Tannar, O. (2022). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. *Jurnal Proaksi*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i1.1913>
- Febrianty, N., & Putra, G. H. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah pada 19 kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021. *JKA: Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(2).
- Handayani, T. U. E. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating. *Volume(2)(1)*, 2348–2361.
- Husni, M. (2022). Analisis pendapatan asli daerah (Pad) terhadap belanja daerah studi kasus pada kabupaten Bengkalis tahun 2017-2019. April.
- Lastri, S., & Fatma, S. H. (2021). Peran mediasi belanja modal dalam hubungan pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah. *Volume(11)(3)*.
- Lathifa, H., & Haryanto. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Mahadewi, M. A. M., & Indraswarawati, S. A. P. A. (2023). Pengaruh pengukuran pemerintah daerah, belanja modal, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota/kabupaten di provinsi Bali. April, 107–116.
- MARLINA, L. (2019). Pengaruh kinerja keuangan daerah dan budget ratcheting terhadap alokasi belanja modal (bukti empiris pada kabupaten/kota di provinsi Aceh). *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 34–44. <https://doi.org/10.35308/akbis.v2i2.931>
- Neilis, S., & Rohman, A. (2019). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–11.
- Niswani, N., & Firdaus, R. (2022). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota provinsi Aceh tahun 2016-2020. *Volume(1)(1)*, 64–78.

- Pangestu, R. (2023). Pengaruh pajak daerah, dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 1080–1088. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2745>
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Dana keistimewaan dan belanja modal terhadap (studi kasus pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2013-2018). *Volume(28)(1)*, 89–105.
- Prawiroyudo, M. P., & Suhendro, S. (2023). Fund and special allocation fund on capital expenditure budget allocation (empirical study on regency and city governments throughout Indonesia in 2018-2021) pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. *Volume*, 9934–9946.
- Sari, B. I. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. *Volume(3)(1)*, 56–60. <https://doi.org/10.4324/9781003322603-5>
- Yanto, J. K. F., & Astuti, S. (2020). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. *Volume(2)(3)*.
- Yulinchton, M. R., Ariani, M. B. N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah: Studi kasus di kabupaten Tegal periode 2016-2019. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 11(2), 303. <https://doi.org/10.30588/jmp.v11i2.893>.